

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu SKPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola Pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD.

Sekretariat DPRD Kab. HSS merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai Perwakilan Rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai arti penting mengingat lembaga legislatif di daerah mempunyai fungsi pengawasan (Controlling), Fungsi penyusunan peraturan daerah (Legislasi) serta fungsi anggaran (Budgeting).

Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis potensi sumber daya daerah, aspirasi masyarakat seta kepentingan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana :

1). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004) ;

2). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang

selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;

- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
- 5). Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- 8). Intruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 9). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- 10). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- 11). Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 ;
- 12). Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD, sehingga dapat lebih mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam rangka perwujudan Good Governance. Disamping itu Renja ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk tahun kedepan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

b. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja ini antara lain sebagai berikut :

1. Tersusunnya instrument Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Tersusunnya Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang keuangan Sekretariat DPRD kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam waktu satu tahun kedepan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, perlu disampaikan Sistematika Penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### BAB IV. PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi instansi Pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi.

Tabel 2.1.1  
Program dan Kegiatan TA.2017 (n-2)

No	Program	Kegiatan
	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai : Gaji dan Tunjangan  Tambahkan Penghasilan PNS  Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1. Gaji Pokok PNS 2. Tunjangan Keluarga 3. Tunjangan Jabatan 4. Tunjangan Fungsional Umum 5. Tunjangan Beras 6. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7. Pembulatan Gaji  1. Tambah Penghasilan Berdasarkan beban kerja 2. Tambah Penghasilan berdasarkan berdasarkan kelebihan jam kerja  1. Belanja Penunjang Operasional DPRD
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 4. Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD 5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /

		<p>operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</li> <li>9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>11. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis lainnya</li> <li>14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</li> </ol>
<b>2.</b>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas</li> <li>2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor</li> <li>3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional</li> <li>4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas</li> <li>5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor</li> </ol>
<b>3.</b>	Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</li> <li>2. Pengadaan pakaian kerja lapangan</li> </ol>
<b>4.</b>	Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
<b>5.</b>	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama</li> <li>2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan</li> <li>3. Rapat-rapat paripurna</li> <li>4. Kegiatan Reses</li> <li>5. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD</li> <li>6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>7. Legislasi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>8. Penyediaan keperluan rumah tangga pimpinan DPRD</li> </ol>

Tabel 2.1.2  
Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kab. HSS  
TA.2017 (n-2)

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Sekretariat DPRD				
	Belanja Pegawai				
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	<b>1,658,764,000</b>	1,370,505,420	82.62	82.62
	Tunjangan Keluarga	<b>168,532,000</b>	124,049,480	73.61	73.61
	Tunjangan jabatan	<b>203,105,000</b>	131,805,000	64.90	64.90
	Tunjangan Fungsional Umum	<b>45,349,000</b>	40,425,000	89.14	89.14
	Tunjangan Beras	<b>107,562,000</b>	71,695,800	66.66	66.66
	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	<b>39,334,000</b>	2,537,037	6.45	6.45
	Pembulatan Gaji	<b>32,000</b>	20,250	63.28	63.28
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	<b>935,163,000</b>	705,627,370	75.46	75.46
	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelebihan jam kerja	<b>1,500,000</b>	0	0.00	0.00
	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	<b>312,480,000</b>	307,640,000	98.45	98.45
	2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran 01			
Penyediaan jasa surat - menyurat		<b>5,850,000</b>	2,175,000	37.18	37.18
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		<b>144,000,000</b>	110,731,742	76.90	76.90
Penyediaan Pelayanan Informasi Perkantoran		<b>52,010,000</b>	51,030,000	98.12	98.12
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		<b>31,750,000</b>	24,554,300	77.34	77.34
Penyediaan Alat Tulis Kantor		<b>30,759,000</b>	24,625,170	80.06	80.06
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		<b>27,150,000</b>	21,692,200	79.90	79.90
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		<b>19,075,000</b>	6,561,500	34.40	34.40
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor		<b>293,550,000</b>	268,273,000	91.39	91.39
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		<b>68,400,000</b>	65,173,500	95.28	95.28
Penyediaan makanan dan minuman		<b>313,040,000</b>	239,596,000	76.54	76.54
Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		<b>107,705,295</b>	95,069,873	88.27	88.27
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya		<b>381,630,000</b>	340,350,000	89.18	89.18
Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah		<b>10,050,000</b>	3,875,400	38.56	38.56
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS		<b>234,000,000</b>	70,438,200	30.10	30.10



No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
3.	Peningkatan Sarana & Prasarana 02				
	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	<b>12,755,000</b>	2,704,400	21.20	21.20
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	<b>15,000,000</b>	2,700,000	18.00	18.00
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	<b>317,300,000</b>	147,922,687	46.62	46.62
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan / dinas	<b>15,290,000</b>	7,005,000	45.81	45.81
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	<b>30,970,000</b>	8,003,000	25.84	25.84	
4.	Peningkatan Disiplin Aparatur 03				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	<b>158,450,000</b>	157,250,000	99.24	99.24
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	<b>37,500,000</b>	37,050,000	98.80	98.80
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 06	3,500,000	347,400	9.93	9.93
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
6.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				
	Hearing/dialog & koordinasi dgn pejabat pemda dan tokoh masy. dan tokoh agama	<b>993,700,000</b>	946,752,000	95.28	95.28
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	<b>139,362,000</b>	110,960,000	79.62	79.62
	Rapat-rapat paripurna	<b>123,480,000</b>	61,664,500	49.94	49.94
	Kegiatan Reses	<b>1,748,160,000</b>	1,457,944,000	83.40	83.40
	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	<b>19,638,500,000</b>	15,964,731,127	81.29	81.29
	Sosialisasi peraturan perundang undangan	<b>115,700,000</b>	91,963,000	79.48	79.48
	Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>221,700,000</b>	70,000,000	31.57	31.57
	Penyediaan keperluan rumah tangga pimpinan DPRD	<b>200,000,000</b>	32,035,800	16.02	16.02
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG</b>		<b>28,962,157,295</b>	<b>23,177,484,156</b>	80.03	80.03
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG (NON GAJI)</b>		<b>25,490,336,295</b>	<b>20,423,178,799</b>	80.12	80.12

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan  
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017 (n-2))			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		
					Target Renja SKPD tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
0			<b>Non Urusan</b>								
0	0		-								
0	0	1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indek Kepuasan Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0	0	1	<b>1</b>	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD Tersedianya materai dan benda pos lainnya	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar

0	0	1	<b>2</b>	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	7 rekening	7 rekening	7 rekening	7 rekening	7 rekening	7 rekening	7 rekening	7 rekening	7 rekening
0	0	1	<b>4</b>	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah medical check up Anggota DPRD dan keluarga	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang
0	0	1	<b>6</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21 buah	21 buah	21 buah	21 buah	21 buah	21 buah	21 buah	21 buah	21 buah
0	0	1	<b>7</b>	Penyebarnya informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	Tersedianya informasi program kegiatan SKPD	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
0	0	1	<b>10</b>	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis
0	0	1	<b>11</b>	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun

0	0	1	<b>12</b>	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	
0	0	1	<b>13</b>	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
0	0	1	<b>15</b>	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buletin perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	50%	
0	0	1	<b>17</b>	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
0	0	1	<b>18</b>	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana transportasi dan akomodasi serta penunjang lainnya keluar daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	

0	0	1	<b>19</b>	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang
0	0	1	<b>20</b>	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya dana transportasi dan akomodasi serta penunjang lainnya kedalam daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0%
0	0	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0	0	2	<b>21</b>	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase rumah dinas yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0	0	2	<b>22</b>	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase tempat dan ruang kerja yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0	0	2	<b>24</b>	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

0	0	2	<b>27</b>	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Persentase peralatan rumah jabatan layak pakai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
0	0	2	<b>28</b>	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
0	0	3		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
0	0	3	<b>2</b>	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang sesuai protokoler	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
0	0	3	<b>3</b>	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Persentase pemenuhan pakaian kerja lapangan yang sesuai protokoler	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

0	0	6		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Nilai AKIP	81	81	81	81	81	81	81	81
0	0	6	<b>1</b>	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
3													
3	40												
3	40	15		<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	Prosentase kesesuaian fasilitasi pelaksanaan program kerja DPRD berdasarkan keputusan DPRD	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3	40	15	<b>2</b>	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Persentase pelaksanaan hearing sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	40	15	<b>3</b>	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Persentase rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	40	15	<b>4</b>	Rapat-rapat paripurna	Persentase rapat-rapat paripurna yang sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	40	15	<b>5</b>	Kegiatan Reses	Persentase pelaksanaan kegiatan reses sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	40	15	<b>7</b>	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	40	15	<b>8</b>	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



3	40	15	11	Legislasi peraturan perundang-undangan	Persentase kajian akademik yang direalisasi ditetapkan terhadap jumlah perda yang diprogramkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
---	----	----	----	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	--

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berikut ini ditampilkan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Target IKU Sekretariat DPRD Kab. HSS TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET
	URAIAN	INDIKATOR	2019
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	BB

Tabel 2.2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK permenda	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (tnn n)	Tahun 2019 (tnn n+1)	Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (tnn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	100	100	100	100	68,44	76,67	-	70,00	80,00	-
2	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	-	-	100	100	100	100	85,25	83,00	-	86,00	88,00	-
3	Persentase fasilitasi keluhan / pengaduan masyarakat	-	-	100	100	100	100	100	100	-	100	100	-
4	Nilai / Predikat AKIP	-	-	81	81	81	72	68,56	70,62	-	70,00	72,00	-
5	Persentase Temuan BPK/Inspektora yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	64,29	100	-	100	100	-

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka Visi yang ingin dicapai / diwujudkan yaitu “Terwujudnya pelayanan prima dan profesional” dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka misi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ingin dicapai yakni :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Publik

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu “Terwujudnya kinerja lembaga legislative yang optimal” dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya capaian kinerja DPRD
2. Masih rendahnya kualitas pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Masih rendahnya kualitas kinerja dan pelayanan publik
4. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan di praktekkan dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Keterbatasan sumber daya manusia (pegawai), sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu makin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.
6. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD, merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.
7. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

#### **1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan Renja ini melalui beberapa tahapan, yang dimulai dengan penyusunan Renja awal. Namun demikian seiring dengan proses penyusunan dan pembahasan Renja SKPD terdapat beberapa perubahan untuk menyempurnakan Renja awal tersebut. Hal ini terlihat dalam table berikutini.

Tabel 2.3.1  
Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2019  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Non Urusan</b>										
	-										
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indek Kepuasan Pelayanan	100%	914,029,180	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indek Kepuasan Pelayanan	100%	3,308,798,885	
<b>1</b>	Penyediaan jasa administrasi kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi kantor	4 jenis	132,283,885	Penyediaan jasa administrasi kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	183,333,885	
<b>2</b>	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayar	7 rekening	144,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	144,000,000	

5	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	SKPD	Jumlah informasi program kegiatan OPD	2 kegiatan	52,200,000	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	19,000,000	
6	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Penyediaan konsumsi	1 tahun	278,040,000	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	263,040,000	
7	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	SKPD	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	12 orang	189,750,000	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	517,775,000	
9	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	SKPD	Rapat dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun	117,755,295	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	2,181,650,000	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indek Kepuasan Pelayanan	100%	1,206,189,150	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indek Kepuasan Pelayanan	100%	786,389,150	
14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	32 jenis	130,814,150	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	140,914,150	

21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	SKPD	Rumah dinas dalam kondisi layak pakai	1 buah	12,755,000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	SKPD	Rumah dinas dalam kondisi baik	1 tahun	12,755,000	
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Kendaraan dinas/operasional layak jalan	18 buah	339,500,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	1 tahun	304,150,000	
27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	SKPD	Peralatan rumah jabatan dalam kondisi baik	10 jenis	12,200,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	SKPD	Peralatan rumah jabatan dalam kondisi baik	1 tahun	12,200,000	
31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	15 jenis	248,270,000	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	136,370,000	
52	Penyediaan belanja keperluan rumah tangga Pimpinan DPRD	SKPD	Keperluan rumah tangga Pimpinan DPRD yang disediakan	12 bulan	480,000,000	Penyediaan belanja keperluan rumah tangga Pimpinan DPRD	SKPD	Keperluan rumah tangga Pimpinan DPRD yang disediakan	1 tahun	180,000,000	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		Indek Kepuasan Pelayanan	100%	299,600,000	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		Indek Kepuasan Pelayanan	100%	318,350,000	



2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	150 stell	241,100,000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	150 stell	259,850,000	
7	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan	SKPD	Jumlah medical cek up	30 orang	58,500,000	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan	SKPD	Jumlah medical cek up	30 orang	58,500,000	
	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan</b>	100%		<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan</b>	100%	10,000,000	
6	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Perangkat Daerah	SKPD	Terlaksananya penatausahaan administrasi perencanaan	100 %	1,500,000	-	-	-	-	-	

7	Penyusunan dokumen keuangan	SKPD	Terlaksananya penatausahaan administrasi pelaporan keuangan	100 %	1,000,000	Penyusunan dokumen keuangan	SKPD	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 dokumen	5,000,000	
8	Penyusunan dokumen AKIP	SKPD	Terlaksananya penatausahaan administrasi laporan AKIP dan LPPD	100 %	1,000,000	Penyusunan dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 dokumen	5,000,000	
<b>Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang</b>											
67	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan</b>		Persentase fasilitasi keluhan / pengaduan masyarakat	100%	17,322,210,000	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan</b>		Persentase fasilitasi keluhan / pengaduan masyarakat	100%	22,357,760,000	

1	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	SKPD	Persentase fasilitasi keluhan pengaduan masyarakat	100%	1,053,700,000	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	SKPD	Persentase fasilitasi keluhan pengaduan masyarakat	100%	1,046,200,000	
2	Kegiatan Reses	SKPD	Persentase pelaksanaan reses sesuai jadwal	100%	956,160,000	Kegiatan Reses	SKPD	Persentase pelaksanaan reses sesuai jadwal	100%	956,160,000	
3	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	SKPD	Persentase penyelenggaraan pengkoordinasian dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai jadwal	100%	15,312,350,000	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	SKPD	Persentase penyelenggaraan pengkoordinasian dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai jadwal	100%	20,355,400,000	

<b>66</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat</b>		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu; Persentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan penyelenggaraan kehumasan dan protokol	100%	987,742,000	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat</b>		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu; Persentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan penyelenggaraan kehumasan dan protokol	100%	529,185,000	
<b>1</b>	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah media massa yang dapat diakses oleh masyarakat	16 media	115,700,000	Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	SKPD	Media massa yang dapat diakses oleh masyarakat	3 media	54,000,000	
<b>2</b>	Legislasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah kajian akademik yang direalisasi	3 kali	221,700,000	Legislasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Persentase propemperda yang terbit tepat waktu	100 %	221,700,000	

3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	SKPD	Persentase rapat-rapat alat kelengkapan dewan sesuai jadwal yang ditetapkan	100%	499,362,000	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	SKPD	Persentase rapat-rapat alat kelengkapan dewan sesuai jadwal yang ditetapkan	100%	60,955,000	
4	Rapat-rapat paripurna	SKPD	Persentase rapat-rapat paripurna sesuai jadwal yang ditetapkan	100%	150,980,000	Rapat-rapat paripurna	SKPD	Persentase rapat-rapat paripurna dan rapat-rapat paripurna istimewa sesuai jadwal yang ditetapkan	100%	192,530,000	
5	Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	SKPD	Media massa yang dapat diakses oleh masyarakat	3 media	00	Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	SKPD	Media massa yang dapat diakses oleh masyarakat	3 media	54,000,000	
					<b>20,733,270,330</b>					<b>27,310,483,035</b>	

### 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019, ada 6 Program dan 23 kegiatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut ada yang sifatnya sebagai penunjang operasional dan ada yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis seperti Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, tidak ada usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volumen	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan 2013 -2018 telah menetapkan Visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif”

Pemahaman terhadap Visi di atas ada 3 (tiga) keadaan yang dicita-citakan, yaitu :

- Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya kebudayaan masyarakat akan kehidupan sosial.
- Terciptanya keadaan daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis, yang ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Terciptanya keadaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang produktif yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan public pada sector pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi daerah.

Berangkat dari visi tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan beragama;
2. Meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah;

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah;
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informatika.

Sedangkan tujuan yang diinginkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
2. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu;
5. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industry kecil dan pariwisata;
6. Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat;
7. Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja;
8. Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah;
9. Terlaksananya nilai-nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari-hari;
10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selanjutnya sasaran pembangunan untuk 5 (Lima) tahun mendatang, berdasarkan peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 maka sasaran dan indikator kinerja pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 27 (Dua Puluh Tujuh) yang menjadi sasaran program pembangunan daerah.



Dengan berpedoman kepada visi misi diatas diharapkan rencana kerja yang disusun dapat selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap aparatur pemerintah yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel. 3.1**

**Analisis Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018  
Terkait Isu Perencanaan Pusat, Regional dan Kabupaten  
serta Permasalahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
dalam RPJPD Tahap III**

Prioritas Nasional	Isu Strategis Kalimantan Selatan	Arahan RPJPD Kabupaten HSS	Isu Strategis Kabupaten HSS
Reformasi birokrasi dan tata kelola	Meningkatkan Kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan pada suatu wilayah, setiap lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 dan memiliki keterkaitan yang erat dengan visi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya pelayanan prima dan profesional”.

Kedudukan Sekretariat Dewan dalam fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada DPRD dan sebagai penghubung Kepala Daerah dengan DPRD, maka visi yang ingin dicapai / diwujudkan adalah terwujudnya pelayanan prima dalam mendukung pelaksanaan tugas dewan sehingga setiap anggota dewan dapat melaksanakan tugas

dan fungsi lembaga DPRD dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan.
3. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan public

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta mengacu pada visi dan misi dan hasil kajian lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta factor-faktor kunci keberhasilan di Sekretariat DPRD, maka dapat diidentifikasi dan ditetapkan tujuan strategis yang dapat mewakili tujuan umum seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan ditetapkannya tujuan strategic dimaksud diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. HSS dapat secara rinci konsisten melaksanakan fungsi-fungsi organisasi sehingga tujuan organisasi selama lima tahun ke depan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil kajian stratgis internal dan eksternal terhadap Sekretariat DPRD Kab. HSS, maka dapat ditetapkan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan.
3. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan public

Sasaran organisasi merupakan gambaran hal yang ingin di wujudkan melalui tindakan yang diambil organisasi guna mencapai tujuan. Sasaran yang baik melalui beberapa ciri antara lain :

1. Sasaran organisasi yang spesifik karena merupakan panduan untuk kelompok organisasi yang bersangkutan.
2. Sasaran organisasi harus dapat di ukur, karena merupakan standar yang dapat dipakai untuk mengukur kemajuan organisasi. Dimensi ukurannya adalah kualitas, kuantitas, waktu, tempat, anggaran dan pengguna anggaran.
3. Sasaran yang bersifat agresif dan dapat dipakai sebagai standar pencapaian tujuan sehingga harus menantang dan dapat diwujudkan.
4. Sasaran yang harus menspesifikasikan hasil ingin dicapai.

Untuk merealisasikan tujuan dari Sekretariat DPRD Kab. HSS maka dibuat penjabarannya dalam bentuk sasaran yang merupakan capaian yang lebih rinci. Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Kab. HSS merupakan bagian interasi dalam proses perencanaan strategiknya yang difokuskan kepada tindakan serta alokasi sumber daya yang ada dalam kegiatan maupun operasionalnya, sehingga bersifat lebih spesifik terinci dapat di ukur dan dapat di capai.

Sasaran Sekretariat DPRD kab. HSS secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan public

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran serta Target Sekretariat DPRD Tahun 2019**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET SASARAN 2019
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %
2	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	BB

### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Program Prioritas dan Pagu Indikatif Pendanaan dan Pokok-pokok Kegiatan. Untuk Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai Program memfasilitasi DPRD dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1). Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
  - Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi kantor
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
  - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
  - Kegiatan Penyediaan Makan Minum
  - Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
  - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
  
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
  - Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
  
- 3). Program Peningkatan disiplin aparatur
  - Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan

- 4). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
  - Kegiatan Penyusunan dokumen keuangan
  - Kegiatan Penyusunan dokumen AKIP
  
- 5). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan
  - Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh masyarakat agama
  - Kegiatan Reses
  - Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
  
- 6). Program Peningkatan Pelayanan PerUndang-undangan dan Hubungan Masyarakat
  - Kegiatan Legislasi peraturan perundang-undangan
  - Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
  - Kegiatan Rapat-rapat paripurna
  - Kegiatan Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD

Rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Kab.HSS Tahun 2019  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0			<b>Non Urusan</b>							
0	0		-							
0	0	1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indek Kepuasan Pelayanan	100%	3,308,798,885		0	
0	0	1	<b>01</b> Penyediaan jasa administrasi kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	183,333,885	Pendapatan Daerah	0 lembar	0
0	0	1	<b>02</b> Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	144,000,000	Pendapatan Daerah	0 rekening	0

0	0	1	<b>06</b>	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	19,000,000	Pendapatan Daerah		0 buah	0
0	0	1	<b>07</b>	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	263,040,000	Pendapatan Daerah		0 kegiatan	0
0	0	1	<b>10</b>	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	517,775,000	Pendapatan Daerah		0 jenis	0
0	0	1	<b>11</b>	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	2,181,650,000	Pendapatan Daerah		0 lembar	0
0	0	1	<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indek Kepuasan Pelayanan	100%	786,389,150	Pendapatan Daerah		0 jenis	0
0	0	1	<b>13</b>	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	140,914,150	Pendapatan Daerah		0 jenis	0

0	0	1	15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	SKPD	Rumah dinas dalam kondisi baik	1 tahun	12,755,000	Pendapatan Daerah		0 eksemplar	0
0	0	1	17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	1 tahun	304,150,000	Pendapatan Daerah		0 tahun	0
0	0	1	18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	SKPD	Peralatan rumah jabatan dalam kondisi baik	1 tahun	12,200,000	Pendapatan Daerah		0 kali	0
0	0	1	19	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	136,370,000	Pendapatan Daerah		0 orang	0
0	0	1	20	Penyediaan belanja keperluan rumah tangga Pimpinan DPRD	SKPD	Keperluan rumah tangga Pimpinan DPRD yang disediakan	1 tahun	180,000,000	Pendapatan Daerah		0 tahun	0
0	0	2		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		Indek Kepuasan Pelayanan	100%	318,350,000			0	



0	0	2	<b>21</b>	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	150 stell	259,850,000	Pendapatan Daerah		0 buah	0
0	0	2	<b>22</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan	SKPD	Jumlah medical cek up	30 orang	58,500,000	Pendapatan Daerah		0 buah	0
0	0	2	<b>24</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan</b>	100%	10,000,000	Pendapatan Daerah		0 buah	0
0	0	2	<b>27</b>	-	-	-	-	-	Pendapatan Daerah		0 jenis	0
0	0	2	<b>28</b>	Penyusunan dokumen keuangan	SKPD	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 dokumen	5,000,000	Pendapatan Daerah		0 jenis	0
0	0	3		Penyusunan dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 dokumen	5,000,000			0	

0	0	3	<b>2</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indek Kepuasan Pelayanan	100%	3,308,798,885	Pendapatan Daerah		0 stell	0
0	0	3	<b>3</b>	Penyediaan jasa administrasi kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	183,333,885	Pendapatan Daerah		0 stell	0
0	0	6		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	144,000,000			0	
0	0	6	<b>1</b>	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	19,000,000	Pendapatan Daerah		0 Laporan	0
3												
3	40			<b>Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang</b>								

3	40	15		<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan</b>		Persentase fasilitasi keluhan / pengaduan masyarakat	100%	22,357,760,000			0	
3	40	15	<b>02</b>	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	SKPD	Persentase fasilitasi keluhan pengaduan masyarakat	100%	1,046,200,000	Pendapatan Daerah		0 kegiatan	0
3	40	15	<b>03</b>	Kegiatan Reses	SKPD	Persentase pelaksanaan reses sesuai jadwal	100%	956,160,000	Pendapatan Daerah		0 kali	0
3	40	15	<b>04</b>	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	SKPD	Persentase penyelenggaraan pengkoordinasian dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai jadwal	100%	20,355,400,000	Pendapatan Daerah		0 kali	0
3	40	15	<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat</b>		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu; Persentase kepuasan	100%	529,185,000	Pendapatan Daerah		0 kegiatan	0

						Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan penyelenggaraan kehumasan dan protokol						
3	40	15	07	Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	SKPD	Media massa yang dapat diakses oleh masyarakat	3 media	54,000,000	Pendapatan Daerah		0 kali/orang	0
3	40	15	08	Legislasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Persentase propemperda yang terbit tepat waktu	100 %	221,700,000	Pendapatan Daerah		0 kali	0
3	40	15	11	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	SKPD	Persentase rapat-rapat alat kelengkapan dewan sesuai jadwal yang ditetapkan	100%	60,955,000	Pendapatan Daerah		0 kali	0
								<b>27,310,483,035</b>				<b>0</b>
TOTAL												



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Kandangan, Juli 2018

**SEKRETARIS DPRD**  
**KAB. HULU SUNGAI SELATAN,**



**H. ZULKIFLI THAUFIK, SH. MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. NIP. 19590816 198503 1 016